

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian dengan topik penyaluran kredit UMKM tersebut adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Teruna (2024)**

Penelitian yang dilakukan oleh Teruna (2024) dari Universitas Indraprasta PGRI bertujuan untuk menganalisis tren penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memproyeksikan perkembangannya pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan model tren, yaitu model eksponensial, kurva-S (*S-curve*), dan kuadratik untuk melihat pola pertumbuhan kredit UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penyaluran kredit UMKM di Indonesia memiliki pola yang berbeda antarprovinsi. Beberapa wilayah mengalami peningkatan signifikan pada sektor perdagangan dan jasa, sementara sektor pertanian dan industri kecil cenderung stagnan atau berfluktuasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa model non-linear, khususnya pendekatan *S-curve*, memberikan proyeksi paling akurat dalam memprediksi perkembangan kredit UMKM dalam jangka pendek karena mampu menggambarkan pola pertumbuhan yang tidak konstan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas penyaluran kredit UMKM dan menggunakan data sekunder perbankan sebagai dasar analisis empiris. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Teruna lebih menitikberatkan pada analisis tren dan proyeksi kredit UMKM, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM melalui pendekatan regresi.

### **2.1.2 Ruslang (2024)**

Penelitian “Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPL, BOPO dan DPK terhadap Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI periode 2010-2012)” bertujuan untuk menguji sejauh mana variabel-rasio keuangan bank seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL), *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Dana Pihak Ketiga* (DPK) secara parsial dan simultan mempengaruhi penyaluran kredit kepada segmen UMKM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terutama adalah ketidakpastian apakah variabel internal bank tersebut secara signifikan menentukan intensitas penyaluran kredit ke UMKM, serta apakah ada dominasi variabel tertentu di antara rasio keuangan tersebut dalam konteks bank publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk menjawab itu, metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan memakai data sekunder dari laporan keuangan bank publik (periode 2010–2012).

Teknik sampling-nya bersifat purposive, yakni memilih bank umum yang memenuhi kriteria tertentu (listing di BEI dan memiliki data kredit UMKM) selama periode pengamatan, sehingga menghasilkan sampel bank-bank terpilih dengan data lengkap. Variabel independennya ialah CAR, ROA, NPL, BOPO, dan DPK, sedangkan variabel dependen adalah nilai atau pertumbuhan kredit UMKM yang disalurkan oleh bank-bank tersebut. Data dianalisis dengan metode regresi linier berganda (atau regresi panel jika data bank-lintas-waktu) untuk melihat pengaruh parsial dan simultan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa rasio keuangan seperti DPK dan ROA cenderung mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, sedangkan rasio seperti NPL dan BOPO kadang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan tergantung periode. Selain itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) relatif besar, menunjukkan bahwa kombinasi variabel-variabel tersebut menjelaskan sebagian besar variasi penyaluran kredit UMKM dalam sampel.

Penelitian ini relevan dengan penelitian karena sama menguji variabel rasio bank dalam konteks kredit UMKM dan menggunakan analisis kuantitatif data sekunder sebagai basis empiris. Namun ada perbedaan signifikan: penelitian tersebut mengambil sampel bank umum nasional dan menggunakan periode historis lama (2010–2012), sedangkan penelitian akan difokuskan pada satu lembaga (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan data lebih mutakhir (termasuk pasca-pandemi). Selain itu, penelitian juga memasukkan variabel KUR dan variabel makroekonomi (inflasi, nilai tukar) ke dalam model analisis, yang tidak terdapat dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian memperluas dan memperdalam model determinan kredit

UMKM dengan cakupan yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kondisi terkini, serta memungkinkan analisis pengaruh internal bank (rasio), kebijakan kredit (KUR), dan kondisi eksternal (makroekonomi) secara simultan dalam satu model empiris.

### **2.1.3 Hartini, Yuliati & Amrul (2023)**

Penelitian Hartini, Yuliati & Amrul (2023) di jurnal Akuntabel bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM oleh bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022, dengan fokus pada variabel internal perbankan dan kondisi keuangan bank sebagai determinan utama; permasalahan yang diangkat mencakup apakah rasio keuangan seperti CAR, NPL, ROA, BOPO, dan DPK memiliki pengaruh parsial dan simultan terhadap jumlah atau pertumbuhan kredit UMKM, serta seberapa besar dampak variabel-variabel tersebut selama periode ekonomi setelah pemulihan pasca-pandemi dan fluktuasi ekonomi lainnya; metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan dari bank umum konvensional yang terdaftar di BEI, teknik sampling purposive dengan kriteria bank yang memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode observasi (2018-2022), variabel independen utama meliputi CAR, NPL, ROA, BOPO, dan DPK sementara variabel dependen adalah besarnya penyaluran kredit UMKM, pengumpulan data melalui laporan tahunan dan data publik perbankan, dan analisisnya menggunakan regresi linier berganda (kemungkinan *panel regression* karena data bank per tahun) untuk melihat pengaruh

parsial (masing-masing variabel bebas terhadap dependen) dan simultan (gabungan variabel) diikuti uji signifikansi.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa beberapa rasio keuangan bank memang berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM misalnya DPK dan ROA umumnya memiliki efek positif, sementara NPL dan BOPO sering menunjukkan efek negatif jika beban operasional tinggi atau risiko kredit memburuk; CAR juga berdampak positif pada kemampuan bank menyalurkan kredit, meskipun dengan kekuatan efek yang berbeda antar bank dan waktu; penelitian ini relevan dengan penelitian kamu karena keduanya fokus pada variabel internal bank (rasio keuangan) dalam mempengaruhi penyaluran kredit UMKM dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta data sekunder perbankan; namun terdapat perbedaan utama: jurnal ini mencakup banyak bank umum konvensional secara agregat dan cakupan nasional, sedangkan penelitian secara spesifik melakukan studi kasus pada satu Bank Pembangunan Daerah (BPD Jawa Timur), yang memungkinkan fokus lebih mendalam pada karakteristik lokal/daerah; selain itu, Hartini et al. tidak memasukkan variabel kebijakan kredit seperti KUR atau variabel makroekonomi (inflasi, nilai tukar) dalam model mereka, yang dalam penelitian akan menjadi tambahan penting untuk melihat pengaruh eksternal di luar rasio internal bank; dengan demikian penelitian memperluas model empirisnya tidak hanya pada aspek internal bank tetapi juga aspek kebijakan dan kondisi makro, sehingga kamu dapat membandingkan hasil-pengaruhnya dan menentukan faktor mana yang dominan di konteks BPD Jawa Timur.

#### 2.1.4 Puspitasari & Musaroh (2022)

Puspitasari & Musaroh (2022) berfokus untuk menguji determinan-determinannya dalam penyaluran kredit untuk UMKM oleh bank umum konvensional di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui variabel-internal dan eksternal mana yang secara signifikan mempengaruhi seberapa besar kredit yang diberikan kepada UMKM dan bagaimana variabel tersebut saling berinteraksi; permasalahan yang diangkat antara lain: apakah rasio bank seperti CAR, ROA, NPL menjadi faktor dominan dibandingkan faktor makroekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi/PDB) dalam konteks kredit UMKM, dan bagaimana kondisi ekonomi pasca-pandemi mungkin mengubah pengaruh tradisional variabel-variabel tersebut; metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain studi panel atau *time-series cross-section*, data berasal dari laporan keuangan bank umum konvensional dan data statistik makroekonomi nasional, teknik sampling purposive memilih bank-bank yang memiliki data keuangan lengkap selama periode tertentu (termasuk pasca-pandemi atau sekitar masa pemulihan ekonomi), variabel bebas mencakup CAR, NPL, ROA, serta variabel makro seperti inflasi dan PDB, variabel dependen adalah jumlah/tingkat penyaluran kredit UMKM, pengumpulan data melalui publikasi bank dan publikasi statistik ekonomi, analisis data menggunakan regresi panel (*fixed effect* atau *random effect*) dan uji robustitas untuk memastikan hasil yang tidak bias; kesimpulan dari Puspitasari & Musaroh menyatakan bahwa baik variabel internal bank (terutama ROA dan CAR) dan variabel makro (terutama pertumbuhan PDB) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit UMKM, sementara NPL cenderung memberikan pengaruh

negatif yang cukup tinggi apabila rasio NPL berada pada ambang risiko tertentu; inflasi dalam beberapa periode tidak signifikan atau pengaruhnya sangat lemah tergantung stabilitas ekonomi; penelitian ini menegaskan bahwa bank yang memiliki modal yang lebih kuat (high CAR), efisiensi operasional, dan profitabilitas tinggi lebih mampu menyalurkan kredit kepada UMKM, serta bahwa kondisi makro yang membaik seperti pertumbuhan ekonomi tinggi mendukung peningkatan kredit UMKM; persamaan dengan penelitian adalah: kamu juga akan menguji variabel-rasio bank (CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK) serta variabel makro (inflasi, nilai tukar) untuk melihat pengaruhnya terhadap kredit UMKM; perbedaan utamanya adalah bahwa Puspitasari & Musaroh menggunakan bank umum konvensional secara nasional sebagai sampel, sedangkan penelitian fokus pada satu bank daerah (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konteks lokal; juga, penelitian menambahkan variabel KUR sebagai variabel kebijakan kredit spesifik Indonesia, yang tidak terdapat di penelitian Puspitasari & Musaroh; serta penelitian kemungkinan memakai data mutakhir termasuk pasca-pandemi, sehingga dapat menangkap dampak kebijakan pemerintah dan adaptasi bank terhadap perubahan kondisi ekonomi lokal.

#### **2.1.5 Kaya (2024)**

Penelitian yang dilakukan oleh Orcun Kaya pada tahun 2024 ini memiliki tujuan utama untuk mengeksplorasi bagaimana pembayaran terlambat (*late payments*) mempengaruhi akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (*SMEs*) dalam

konteks negara-negara Eropa selama periode 2019-2023; penelitian ini mengangkat permasalahan bahwa meskipun banyak literatur sudah menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dapat merusak likuiditas dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi UKM/SMEs, masih kurang dipahami secara rinci bagaimana pembayaran terlambat tersebut berdampak pada ketersediaan kredit dan syarat-syarat pinjaman (*loan terms*), termasuk rasio bunga, jumlah pinjaman yang disetujui, dan apakah terjadi *credit rationing* oleh bank. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan data primer pada level perusahaan (*firm-level data*) dari sebelas negara Eropa antara 2019-2023, melibatkan survei dan data administratif; teknik sampling melibatkan perusahaan-UKM yang mengalami keterlambatan pembayaran secara tetap atau sesekali serta perusahaan yang tidak mengalami, untuk perbandingan; variabel independen utama adalah frekuensi keterlambatan pembayaran, plus variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, umur, profitabilitas, variabel makro (termasuk kondisi ekonomi negara, mungkin inflasi atau PDB), sedangkan variabel dependen adalah akses ke pembiayaan (apakah kredit disetujui atau ditolak), syarat pinjaman (termasuk bunga, jumlah akhir, waktu pembayaran). Analisis dilakukan melalui regresi panel *firm-level* serta model analisis kredit rationing dan kondisi pinjaman (*loan terms*), dengan pengujian robust terhadap heteroskedastisitas dan efek negara/perusahaan. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa UKM yang sering atau sesekali mengalami keterlambatan pembayaran menghadapi kesulitan signifikan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank, dengan mekanisme utama berupa *credit rationing* bank menjadi lebih berhati-hati, memperketat persyaratan pinjaman seperti menaikkan

suku bunga, mengurangi jumlah pinjaman, atau menolak permohonan kredit sama sekali; penelitian ini juga menemukan bahwa efeknya lebih kuat ketika perusahaan-UKM mengalami ketidakpastian cash flow karena keterlambatan pembayaran, dan bahwa kondisi ekonomi makro yang stabil dapat memoderasi efek negatif tersebut dalam beberapa negara.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah bahwa kedua penelitian sama-sama mengkaji akses atau pemberian kredit kepada usaha kecil/menengah (UMKM/*SMEs*), dan melihat pengaruh faktor eksternal/perilaku yang dapat mempengaruhi kepercayaan bank atau keputusan pemberian kredit. Keduanya menggunakan pendekatan empirical kuantitatif serta variabel kontrol di luar variabel internal bank saja, sehingga memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh. Namun terdapat beberapa perbedaan penting: penelitian Kaya tidak fokus pada variabel rasio keuangan bank seperti CAR, BOPO, NPL, atau variabel kebijakan spesifik seperti KUR, melainkan lebih ke sisi debitur/perilaku UMKM (*late payments*) dan syarat pinjaman; juga konteksnya adalah negara maju di Eropa, bukan bank daerah di Indonesia, sehingga struktur ekonomi, regulasi, dan kondisi makro mungkin sangat berbeda. Penelitian akan menambahkan variabel internal bank dan kebijakan lokal (KUR) serta fokus pada satu institusi lokal (BPD Jawa Timur), sehingga memungkinkan analisis yang lebih detail mengenai bagaimana variabel bank dan kebijakan nasional serta kondisi makro di Indonesia bersama-sama mempengaruhi pemberian kredit UMKM. Dengan demikian, penelitian Kaya memberi pelajaran bahwa variabel non-tradisional seperti perilaku debitur (keterlambatan pembayaran)

juga harus diperhatikan, tapi penelitian fokus pada variabel yang berbeda sekaligus lokalitas dan kebijakan kredit sebagai variabel utama.

#### **2.1.6 IMF Staff Country Report 2024**

Penelitian “*Financing Barriers and Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia*” oleh International Monetary Fund (IMF) Staff (2024) bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam akses keuangan bagi UMKM di Indonesia serta bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi kinerja usaha, termasuk pertumbuhan penjualan dan produktivitas tenaga kerja; permasalahan utama yang diangkat adalah bahwa meskipun UMKM memegang peranan penting dalam PDB dan tenaga kerja, banyak dari usaha kecil dan menengah menghadapi kendala seperti prosedur perbankan yang rumit, kurangnya agunan, biaya pinjaman tinggi, rendahnya literasi keuangan, kurangnya catatan keuangan yang baik, infrastruktur yang tidak memadai, serta distribusi kredit yang timpang antar wilayah; metode penelitian menggunakan data sekunder dari *World Bank Enterprise Survey (WBES)* untuk Indonesia, data firma-level (UKM) termasuk karakteristik usaha seperti umur usaha, kepemilikan (domestik atau asing), infrastruktur, kemampuan manajerial, serta variabel kontrol lain, dengan teknik sampling berdasarkan perusahaan-UKM yang diwawancarai dalam survei tersebut; variabel independen mencakup hambatan hambatan akses keuangan (misalnya kebutuhan agunan, biaya, prosedur, catatan kredit), karakteristik usaha (umur, kepemilikan asing, web presence), dan variabel makroindikator yang muncul dalam kontrol model; variabel dependen adalah kinerja

usaha (pertumbuhan penjualan, produktivitas tenaga kerja) dan persepsi akses keuangan sebagai kendala; analisis dilakukan dengan regresi multilevel / regresi linier / logit/ordered logit tergantung variabel dependen/persepsi, dengan kontrol kesalahan standar dan efek firm atau region; kesimpulannya penelitian ini menemukan bahwa usaha yang muda, domestik, dengan catatan infrastruktur buruk, menghadapi hambatan akses keuangan yang signifikan dan bahwa keterbatasan akses ke pembiayaan berdampak negatif terhadap pertumbuhan usaha dan produktivitas tenaga kerja; manajerial pengalaman atau kepemilikan asing serta akses digital (seperti *website availability*) dapat meredam sebagian efek negatif tersebut; distribusi hambatan ini juga tidak merata antar wilayah, sehingga UKM di daerah dengan infrastruktur yang lebih lemah cenderung lebih terpinggirkan akses pembiayaannya.

Persamaan utamanya adalah bahwa penelitian IMF sama-sama fokus pada UMKM dan akses/pemberian kredit sebagai aspek penting penggerak ekonomi lokal/nasional, serta menggunakan data empiris kuantitatif dengan variabel karakteristik usaha dan kondisi eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja atau kemampuan memperoleh kredit. Perbedaan utama adalah bahwa penelitian IMF lebih menitikberatkan pada sisi permintaan kredit / hambatan akses dari sudut UMKM (UKM-level), bukan pada sisi bank atau rasio keuangannya, dan variabel-variabelnya lebih banyak berkaitan dengan karakteristik usaha dan persepsi pelaku UKM tentang hambatan, bukan menganalisis bagaimana bank secara internal memutuskan pemberian kredit berdasarkan rasio keuangan atau berdasarkan variabel kebijakan seperti KUR atau nilai tukar. Selain itu, konteks penelitian IMF bersifat nasional dan agregat dari

survei firma, bukan studi kasus institusi perbankan tertentu. Penelitian menambah kekhususan dengan fokus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, serta memasukkan variabel internal bank (CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK) dan variabel makro (inflasi, nilai tukar), serta kebijakan spesifik seperti KUR yang merupakan kebijakan kredit pemerintah.

#### **2.1.7 Thomas (2023)**

Penelitian Thomas (2023) bertujuan untuk memodelkan hubungan antar *key enablers* yang mempengaruhi pertumbuhan *FinTech* yang menyediakan layanan kredit untuk UKM (*SMEs*) di pasar berkembang (India), dengan fokus pada faktor-apa saja yang paling kritis dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam ekosistem *FinTech*; permasalahan yang diangkat berkenaan dengan kurangnya pemahaman empiris tentang enabler utama *FinTech* lending SME di negara berkembang, khususnya dalam melihat perspektif multi-stakeholder (praktisi *FinTech*, pakar, pembuat kebijakan, investor) untuk memahami faktor penyebab dan faktor terpengaruh dalam sistem, serta bagaimana pandemi Covid-19 mengubah prioritas atau kondisi ekosistem kredit *FinTech* bagi UKM.

Metode penelitian bersifat kuantitatif/kuantitatif-kualitatif dengan penggunaan teknik *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), tepatnya metode Grey DEMATEL, untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat antar enabler, berdasarkan data persepsi yang dikumpulkan lewat kuesioner kepada stakeholder (*FinTech* practitioners, experts, policymakers, investors) di India; teknik sampling dilakukan dengan *purposive*

*sampling* untuk memilih stakeholder yang relevan, responden dikontak melalui jaringan profesional, dan jumlah responden dalam penelitian ini relatif kecil (misalnya 18 responden aktif dari berbagai kelompok stakeholder) tetapi cukup untuk menganalisis hubungan antar faktor melalui *Grey DEMATEL*; variabel-variabel enabler yang diidentifikasi meliputi permintaan kredit dari UKM, ketersediaan data alternatif, penetrasi internet/smartphone, regulasi yang kondusif, kolaborasi *FinTech*-bank tradisional, solusi keuangan end-to-end, skalabilitas operasi bisnis, keamanan data, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan kredit oleh *FinTech*; pengumpulan data adalah berdasarkan kuesioner persepsi stakeholder dan analisis antar-faktor, kemudian dilakukan analisis dengan *Grey DEMATEL* untuk menentukan mana enabler yang menjadi *driving enabler* (yang mempengaruhi banyak faktor lain), *driven enabler*, serta mengurutkan keutamaannya, ditambah pemeriksaan perbedaan persepsi antar stakeholder melalui ukuran seperti jarak Euclidean; kesimpulan relevan adalah bahwa beberapa enabler utama (misalnya permintaan UKM terhadap kredit, ketersediaan data alternatif, dan dampak Covid-19) adalah enabler kritikal yang memiliki pengaruh kuat terhadap ekosistem *FinTech* SME lending, sedangkan enabler seperti kolaborasi antara *FinTech* dan lembaga keuangan tradisional, solusi end-to-end, dan skalabilitas bisnis lebih tergolong *critical dependents* yang sangat dipengaruhi faktor lain; penelitian ini juga merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat lanskap data digital, meningkatkan literasi keuangan digital, memperbaiki regulasi yang mendukung inovasi *FinTech*, dan

memfasilitasi kolaborasi antara *FinTech* dan bank tradisional untuk memperluas akses Kredit kepada UKM.

Persamaan dengan peneliti penulis adalah penelitian sama-sama mengkaji aspek akses kredit untuk UKM/UMKM, dan mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi mekanisme pemberian kredit, termasuk kondisi pasar/permintaan kredit, regulasi, dan kondisi situasional seperti pandemi; kedua penelitian memakai pendekatan empiris dan memperhatikan bahwa faktor non-tradisional (selain rasio keuangan bank) juga penting dalam mempengaruhi akses pembiayaan UMKM. Perbedaan utama: jurnal Thomas tidak fokus pada variabel internal bank seperti CAR, NPL, BOPO, ROA, atau kebijakan kredit spesifik seperti KUR; melainkan lebih pada infrastruktur digital, regulasi, data alternatif, dan faktor ekosistem *FinTech*; juga, penelitian Thomas menggunakan persepsi stakeholder sebagai data primer dan metode Grey DEMATEL (MCDM) untuk melihat hubungan antar enabler, bukan regresi kuantitatif dengan data keuangan bank dan variabel makroekonomi seperti penelitian. Selain itu konteksnya adalah *FinTech* dan UKM di India, sedangkan penelitian fokus pada lembaga bank daerah di Indonesia (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dan variabel kebijakan perbankan domestik (termasuk KUR) serta data lebih mutakhir pasca-pandemi.

#### **2.1.8 Sari & Wijaya (2023)**

Sari & Wijaya (2023) bertujuan untuk menganalisis determinan utama yang mempengaruhi pemberian kredit kepada UKM (*SMEs*) oleh bank umum konvensional

di Indonesia, dengan fokus pada pengaruh rasio keuangan bank, kondisi makroekonomi, dan karakteristik UKM terhadap jumlah dan pertumbuhan kredit; permasalahan yang diangkat adalah bahwa meskipun UMKM merupakan kontributor besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, masih terdapat variasi signifikan dalam penyaluran kredit antar bank dan antar daerah, sehingga diperlukan pemahaman empiris tentang faktor internal bank (rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK) serta faktor eksternal seperti inflasi, pertumbuhan PDB, dan nilai tukar terhadap keputusan pemberian kredit, serta bagaimana kombinasi faktor ini mempengaruhi intensitas dan distribusi kredit; metode penelitian bersifat kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan bank komersial dan statistik makroekonomi nasional Indonesia selama periode 2018–2022, teknik sampling purposive memilih bank yang memiliki data lengkap selama periode penelitian, variabel independen mencakup rasio keuangan bank (CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK), variabel makro (inflasi, nilai tukar), dan karakteristik UKM (ukuran, umur, sektor usaha), sedangkan variabel dependen adalah jumlah atau pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UKM; pengumpulan data melalui laporan tahunan bank, publikasi BI, dan data statistik pemerintah, dianalisis menggunakan regresi panel (*fixed/random effect*) dan uji multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas untuk validitas model; kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan bank seperti ROA, CAR, dan DPK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit UMKM, sedangkan NPL cenderung memiliki efek negatif; dari sisi makro, pertumbuhan PDB juga berpengaruh positif sementara inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh variabel tergantung kondisi

periode; penelitian ini menekankan bahwa kombinasi faktor internal bank dan kondisi ekonomi makro sangat menentukan kapasitas dan intensitas bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, serta rekomendasi diberikan agar bank lebih proaktif menyesuaikan kebijakan kreditnya dengan kondisi internal dan eksternal untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan.

Persamaan dengan penelitian adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti pengaruh rasio keuangan bank dan variabel makro terhadap penyaluran kredit UMKM, menggunakan data kuantitatif sekunder perbankan, dan metode analisis regresi panel atau sejenis untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengaruh kombinasi faktor internal bank dan kondisi eksternal makro, yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Perbedaannya adalah penelitian Sari & Wijaya bersifat multi-bank nasional, sedangkan penelitian berfokus pada satu lembaga (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), memungkinkan analisis lebih mendalam terkait karakteristik lokal dan strategi kredit spesifik. Selain itu, penelitian menambahkan variabel kebijakan khusus seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak dibahas dalam jurnal ini, sehingga model penelitian lebih lengkap dan kontekstual terhadap kebijakan perbankan daerah dan nasional saat ini, serta relevan untuk kondisi pasca-pandemi dan tren terkini pemberian kredit UMKM di Jawa Timur.

Tabel 2. 1 Tabel Ringkasan Penelitian terdahulu

| Peneliti                 | Tahun | Variabel Dependen    | Variabel Independen                                                        | Populasi                                  | Teknik Analisis                                  | Kesimpulan                                                                             |
|--------------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Teruna                   | 2024  | Kredit UMKM          | Tren waktu, faktor spasial antarprovinsi                                   | Data sekunder perbankan nasional          | Analisis Tren (Eksponensial, S-curve, Kuadratik) | Signifikan positif                                                                     |
| Ruslang                  | 2024  | Kredit UMKM          | CAR, ROA, NPL, BOPO, DPK                                                   | Bank umum terdaftar di BEI                | Regresi Linier Berganda                          | DPK dan ROA signifikan positif; NPL dan BOPO tidak signifikan                          |
| Hartini, Yuliati & Amrul | 2023  | Kredit UMKM          | CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK                                                   | Bank umum konvensional di BEI (2018–2022) | Regresi Linier Berganda                          | DPK, ROA, dan CAR signifikan positif; NPL dan BOPO negatif/tidak signifikan            |
| Puspitasari & Musaroh    | 2022  | Kredit UMKM          | CAR, NPL, ROA, Inflasi, PDB                                                | Bank umum konvensional di Indonesia       | Regresi Panel ( <i>Fixed/Random Effect</i> )     | CAR, ROA, dan PDB signifikan positif; NPL negatif signifikan; Inflasi tidak signifikan |
| Kaya                     | 2024  | Akses Pembiayaan UKM | Keterlambatan pembayaran, ukuran perusahaan, profitabilitas, kondisi makro | UKM di 11 negara Eropa (2019–2023)        | Regresi Panel Firm-Level                         | Keterlambatan pembayaran berpengaruh negatif signifikan terhadap akses pembiayaan      |
| IMF Staff                | 2024  | Kinerja UMKM         | Hambatan akses keuangan (agunan, biaya,                                    | UMKM Indonesia ( <i>World Bank</i>        | Regresi Multilevel / Linier / Logit              | Hambatan akses keuangan berpengaruh                                                    |

| Peneliti      | Tahun | Variabel Dependen                      | Variabel Independen                                                                                                                       | Populasi                                                              | Teknik Analisis                              | Kesimpulan                                                                                                                       |
|---------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |                                        | prosedur, catatan kredit, infrastruktur, literasi keuangan)                                                                               | <i>Enterprise Survey</i> )                                            |                                              | negatif signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas UMKM                                                                   |
| Thomas        | 2023  | Pertumbuhan <i>FinTech</i> Lending SME | Permintaan kredit UKM, data alternatif, penetrasi internet, regulasi, kolaborasi <i>FinTech</i> -bank, skalabilitas bisnis, keamanan data | Praktisi <i>FinTech</i> , pakar, pembuat kebijakan, investor di India | Grey Dematel (MCDM)                          | Permintaan kredit UKM, data alternatif, dan regulasi signifikan positif; kolaborasi <i>FinTech</i> -bank dipengaruhi faktor lain |
| Sari & Wijaya | 2023  | Kredit UMKM                            | CAR, NPL, ROA, BOPO, DPK, Inflasi, PDB, Nilai Tukar, Karakteristik UKM                                                                    | Bank umum konvensional di Indonesia (2018–2022)                       | Regresi Panel ( <i>Fixed/Random Effect</i> ) | ROA, CAR, DPK, dan PDB signifikan positif; NPL negatif signifikan; Inflasi dan Nilai Tukar variabel tergantung periode           |

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Intermediasi

Teori intermediasi berfokus pada peran lembaga keuangan, khususnya bank, sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (seperti deposan) dan pihak yang membutuhkan dana (seperti debitur UMKM). Bank berfungsi mengalihkan dana dari tabungan masyarakat yang tidak terpakai untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai mediator yang mengelola risiko dan memfasilitasi akses keuangan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Menurut Freixas dan Rochet (2008), peran bank sebagai lembaga intermediasi mencakup dua fungsi utama: pertama, mengurangi biaya transaksi dengan menyediakan saluran yang efisien untuk menghimpun dan menyalurkan dana, dan kedua, mengelola risiko dengan cara mendiversifikasi portofolio pinjaman dan melakukan penilaian terhadap calon debitur. Dengan demikian, bank memiliki kemampuan untuk menilai dan memitigasi risiko yang terkait dengan pemberian kredit, termasuk kredit untuk UMKM, yang cenderung lebih berisiko karena kurangnya jaminan dan informasi keuangan yang terbatas. Teori ini relevan dengan penelitian ini karena menggambarkan bagaimana bank, melalui rasio-rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan *Return on Assets* (ROA), dapat memengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit UMKM. Dengan modal yang cukup (CAR tinggi), kualitas aset yang baik (NPL rendah), dan

profitabilitas yang stabil (ROA tinggi), bank dapat lebih mudah menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam rasio-rasio tersebut dapat memengaruhi kemampuan bank dalam melakukan intermediasi yang efektif, yang berujung pada penurunan penyaluran kredit.

### 2.2.2 Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kaidah yang umum berlaku, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan bagi perbankan untuk menilai calon debiturnya dan selalu menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan Prinsip 5C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*). *Character* terkait dengan keyakinan bank terhadap sifat atau watak calon debitur. *Capacity* menyangkut keyakinan bank terhadap kemampuan calon debitur dalam membayar kembali kreditnya, *Capital* berhubungan dengan sumber-sumber pembiayaan calon debitur dalam usaha yang dilakukan, *Collateral* merupakan jaminan fisik/non fisik dari calon debitur, dan *Condition of Economies* terkait dengan kondisi ekonomi saat ini dan masa depan.

### 2.2.3 Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-undang tersebut, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuai Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dengan melihat operasionalisasinya, bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, sifat dan jasa yang diberikan bank umum mencakup seluruh jasa perbankan yang ada, termasuk wilayah operasinya. Dalam menjalankan usahanya, maka bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga, dan masih terdapat juga sumber dana lain dalam bentuk simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Jadi sumber dana bank juga berasal dari dana pihak kedua, dengan demikian sumber dana pihak ketiga dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Sumber Dana Pihak Ketiga} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Sumber Dana}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

### 2.2.3 Penilaian kesehatan bank umum

Penilaian kesehatan bank umum merupakan aspek krusial dalam sistem keuangan suatu negara karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta produk jasa keuangan lainnya, sehingga stabilitas dan kesehatan bank tidak hanya berdampak pada lembaga itu sendiri, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk perlindungan deposan, kelancaran aliran kredit, dan pengendalian risiko sistemik. Kesehatan bank dapat diukur melalui beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif, yang secara bersama-sama mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, menjaga likuiditas, mengelola risiko kredit, operasional, pasar, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta mencapai profitabilitas yang wajar.

#### 1. Penilaian Likuiditas

Penilaian likuiditas merupakan dimensi penting dalam menilai sejauh mana bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk menyediakan dana secara cepat dan memadai dalam memenuhi permintaan penarikan dana nasabah atau pembiayaan kredit baru. Ketidakmampuan menjaga likuiditas dapat mengarah pada krisis kepercayaan dan berpotensi menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*). Penilaian likuiditas umumnya dilakukan *Loan to Deposit Ratio* melalui rasio (LDR) atau rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK). LDR menunjukkan seberapa besar dana masyarakat yang dihimpun bank telah

disalurkan kembali dalam bentuk kredit; rasio yang terlalu tinggi mencerminkan agresivitas dalam penyaluran kredit yang berisiko terhadap likuiditas, sementara rasio terlalu rendah mengindikasikan potensi inefisiensi dalam intermediasi dana. Menurut ketentuan OJK, LDR ideal berada dalam kisaran tertentu (biasanya 78%-92%), agar bank tetap memiliki kemampuan memenuhi kewajiban likuiditas tanpa mengorbankan profitabilitas. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, tingkat suku bunga, serta kepercayaan deposan turut memengaruhi stabilitas likuiditas bank. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang sehat memerlukan keseimbangan antara profitabilitas dan kehati-hatian agar bank dapat menjaga kepercayaan publik serta menjalankan fungsi intermediasinya secara berkelanjutan. Adapun pengukuran likuiditas dengan rasio LDR adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit Yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

## 2. Penilaian Kualitas Aset

Menggambarkan sejauh mana aset produktif bank, terutama kredit yang diberikan, dikelola dengan baik dan memiliki tingkat risiko yang terkendali. Kualitas aset mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola portofolio kredit dan menekan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) agar tidak melebihi batas wajar. Kredit merupakan aset produktif utama bagi bank, sehingga peningkatan kredit bermasalah akan langsung menurunkan pendapatan bunga dan menggerus modal bank akibat meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Penilaian kualitas aset dilakukan dengan mengamati rasio NPL terhadap total kredit, baik

gross maupun net, yang menunjukkan persentase kredit bermasalah dari keseluruhan portofolio kredit. Semakin tinggi rasio NPL, semakin buruk kualitas aset bank, dan semakin tinggi pula risiko gagal bayar yang harus ditanggung. OJK menetapkan batas maksimum NPL bruto sebesar 5% untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Selain NPL, kualitas aset juga dinilai dari diversifikasi aset, manajemen risiko kredit, serta efektivitas penilaian agunan. Kualitas aset yang baik akan mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara prudent, meminimalkan risiko kerugian, serta mendukung profitabilitas dan kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.

Adapun penilaian kualitas aset, khususnya kualitas kredit adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang disalurkan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

### 3. Penilaian Profitabilitas

Menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya secara efisien dan berkelanjutan. Profitabilitas mencerminkan kinerja manajerial dalam mengelola pendapatan dan biaya serta kemampuan bank dalam memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan menjaga kelangsungan usaha. Indikator yang lazim digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). ROA menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki bank mampu menghasilkan laba bersih, sedangkan BOPO menggambarkan tingkat efisiensi operasional bank, di mana rasio yang tinggi menandakan beban operasional yang besar dibandingkan

pendapatan yang diperoleh. OJK menekankan bahwa ROA minimal yang sehat berada di atas 1,25%, sementara BOPO ideal di bawah 85%, agar bank dianggap efisien dan kompetitif. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan manajemen yang efektif dalam pengelolaan aset, pengendalian biaya, serta diversifikasi sumber pendapatan non-bunga. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, serta regulasi fiskal dan moneter juga dapat memengaruhi profitabilitas bank. Dengan demikian, rasio profitabilitas menjadi salah satu alat ukur utama bagi regulator dan investor untuk menilai kinerja keuangan bank dan kemampuannya dalam mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.

Adapun penilaian profitabilitas yang diperoleh bank berdasarkan penggunaan asetnya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Profitabilitas yang diperoleh bank juga ditentukan oleh efisiensi dalam operasionalnya, dimana dalam efisiensi operasional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (5)$$

#### 4. Penilaian Permodalan

Merupakan aspek vital dalam menilai kemampuan bank untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari eksposur bisnisnya. Permodalan menunjukkan tingkat ketahanan bank terhadap risiko dan menjadi dasar kepercayaan publik terhadap stabilitas institusi keuangan. Indikator utama dalam penilaian permodalan

adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR, semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit, pasar, dan operasional yang mungkin terjadi. OJK menetapkan ketentuan minimum CAR sebesar 8% sesuai dengan standar Basel III, namun bank yang memiliki CAR jauh di atas batas minimum mencerminkan kondisi permodalan yang kuat dan kemampuan ekspansi kredit yang lebih tinggi. Permodalan juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan kredit produktif, termasuk kredit kepada UMKM, karena dengan modal yang cukup, bank dapat memperluas portofolio kredit tanpa mengorbankan tingkat keamanan keuangannya. Selain itu, struktur permodalan yang sehat meningkatkan kepercayaan investor dan depositan terhadap kinerja dan stabilitas bank.

Penilaian permodalan untuk mengantisipasi aset yang berisiko adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{ATMR Kredit} + \text{ATMR Pasar} + \text{ATMR Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

Secara keseluruhan, penilaian kesehatan bank umum melalui indikator likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan dan manajerial suatu bank. Keempat aspek tersebut saling berkaitan: likuiditas yang baik mendukung kelancaran penyaluran kredit, kualitas aset yang terjaga mengurangi risiko gagal bayar, profitabilitas yang tinggi mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, sedangkan permodalan yang kuat menjamin

kemampuan bank menghadapi risiko ke depan. Dalam konteks penelitian terkait penyaluran kredit UMKM, indikator-indikator ini menjadi variabel penting karena mencerminkan sejauh mana bank memiliki kapasitas internal untuk memperluas pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, penilaian kesehatan bank tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai dasar kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan bank, yang mencakup *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), *Return on Assets* (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio likuiditas atau Dana Pihak Ketiga terhadap aset tertentu, yang masing-masing memberikan gambaran yang berbeda tentang kesehatan bank. CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang mungkin timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, sehingga semakin tinggi rasio ini, semakin aman posisi modal bank dalam menghadapi potensi kerugian.

NPL menunjukkan kualitas aset atau tingkat kredit bermasalah, yang apabila tinggi menandakan potensi gagal bayar nasabah yang dapat menggerus modal dan menurunkan profitabilitas bank; ROA mencerminkan efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan laba, sehingga menjadi ukuran kinerja keseluruhan manajemen bank; BOPO mengindikasikan seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasional relatif terhadap pendapatan yang diperoleh, di mana rasio yang rendah menunjukkan efisiensi operasional yang baik; sementara rasio likuiditas atau DPK

menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kepercayaan deposan. Selain indikator kuantitatif, penilaian kesehatan bank juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance*, strategi ekspansi kredit, kebijakan manajemen risiko, pengendalian internal, sistem teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, karena faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan bank dalam mengantisipasi risiko yang muncul baik dari internal maupun eksternal. Secara praktis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara rutin melakukan penilaian kesehatan bank dengan menggabungkan indikator kuantitatif dan kualitatif melalui mekanisme *risk-based rating*, termasuk penggunaan skala penilaian *CAMELS (Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk)*, yang memungkinkan regulator mengklasifikasikan bank ke dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, sehingga mempermudah pengawasan, penentuan tindakan korektif, dan pemberian sanksi atau bantuan likuiditas jika diperlukan.

Bank Pembangunan Daerah (BPD), penilaian kesehatan tidak hanya mengandalkan standar nasional tetapi juga mempertimbangkan kontribusi bank terhadap pembangunan daerah, pengelolaan kredit UMKM lokal, serta efektivitas penyaluran kredit program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang merupakan salah satu instrumen utama untuk mendukung sektor UMKM sekaligus menjadi risiko spesifik bagi bank jika tidak dikelola dengan baik. Dalam praktik penilaian kesehatan BPD, CAR yang cukup tinggi mencerminkan kemampuan bank

menghadapi risiko yang bersumber dari ketidakpastian ekonomi daerah, sedangkan NPL menjadi fokus penting karena sebagian besar kredit diberikan kepada sektor UMKM yang memiliki risiko kegagalan bisnis lebih tinggi dibandingkan korporasi besar, sehingga manajemen bank harus menyeimbangkan target ekspansi kredit dengan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan kredit, jaminan, dan pengawasan pasca-pencairan. ROA dan BOPO tetap menjadi ukuran utama efisiensi operasional dan profitabilitas, tetapi harus dikaitkan dengan tujuan pembangunan daerah dan keberpihakan pada UMKM, sehingga bank dapat menilai apakah pengelolaan dana pihak ketiga dan sumber internal lainnya digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengorbankan kesehatan keuangan bank. Penilaian kesehatan bank juga semakin kompleks ketika mempertimbangkan faktor eksternal makroekonomi, termasuk inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi regional, karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah membayar kredit, biaya dana, dan risiko pasar yang mempengaruhi CAR, NPL, dan likuiditas bank. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank umum adalah proses komprehensif yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan indikator internal bank dengan faktor eksternal dan kebijakan publik, serta memperhitungkan tujuan pembangunan ekonomi lokal khususnya bagi BPD yang memiliki misi ganda antara profitabilitas dan pembangunan daerah. Dengan pemahaman menyeluruh ini, manajemen bank, regulator, dan peneliti dapat mengevaluasi kinerja bank secara objektif, mengidentifikasi area risiko yang kritis, serta merumuskan strategi pemberian kredit yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan, termasuk optimalisasi penyaluran kredit kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal.

#### **2.2.4 Faktor Ekonomi Makro/Moneter**

Faktor ekonomi makro atau moneter merupakan variabel penting yang memengaruhi seluruh aspek perekonomian suatu negara, termasuk stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, perilaku konsumen, dan kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit, sehingga analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi sangat relevan dalam penelitian ekonomi dan perbankan, khususnya dalam konteks penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara umum, ekonomi makro mempelajari fenomena agregat yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, neraca pembayaran, nilai tukar, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah dan bank sentral, di mana masing-masing faktor memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan bank menyalurkan kredit dan menjaga kesehatan keuangan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi makroekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan produksi, konsumsi, dan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan kredit, menurunkan risiko kredit bermasalah, serta mendorong ekspansi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif, termasuk UMKM; sebaliknya, pertumbuhan PDB yang melambat atau negatif akan menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan risiko gagal bayar, dan

mempersulit bank dalam menentukan portofolio kredit yang sehat. Inflasi, sebagai indikator perubahan tingkat harga barang dan jasa, juga menjadi faktor penting dalam penyaluran kredit, karena inflasi yang tinggi cenderung mengurangi daya beli riil masyarakat, meningkatkan biaya modal, serta memicu ketidakpastian dalam perencanaan bisnis, sehingga bank harus mempertimbangkan tingkat inflasi ketika menentukan suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, dan persyaratan agunan; inflasi rendah dan stabil, sebaliknya, memberikan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan kredit karena risiko penurunan nilai riil pembayaran kredit lebih kecil dan proyeksi pendapatan debitur lebih dapat diprediksi. Adapun pengukuran inflasi adalah sebagai berikut:

$$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (7)$$

Nilai tukar mata uang juga termasuk variabel makro yang berpengaruh signifikan, terutama bagi kredit UMKM yang memiliki eksposur terhadap transaksi internasional, karena fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku atau mengurangi daya saing ekspor, sehingga mempengaruhi kemampuan UMKM membayar kewajibannya dan risiko bank terhadap kredit yang diberikan; kestabilan nilai tukar memberikan kepastian bagi debitur dan kreditor, sedangkan volatilitas tinggi dapat menimbulkan risiko tambahan yang harus dikelola oleh bank melalui strategi hedging atau penyesuaian suku bunga. Selain itu, tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter memiliki pengaruh langsung terhadap biaya dana bagi bank dan suku bunga kredit yang

diberikan kepada nasabah; suku bunga yang rendah cenderung menurunkan biaya kredit, meningkatkan permintaan pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan suku bunga tinggi dapat menekan permintaan kredit, memperlambat pertumbuhan penyaluran kredit, dan meningkatkan risiko gagal bayar jika debitur tidak mampu menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan finansialnya. Likuiditas sistem perbankan, yang juga dipengaruhi oleh faktor makro, termasuk jumlah dana pihak ketiga (DPK), cadangan wajib minimum, dan aliran dana antarbank, menentukan kemampuan bank dalam menyediakan pembiayaan secara cepat dan aman; kondisi likuiditas yang baik memungkinkan bank menyalurkan kredit dengan lebih luas, sedangkan tekanan likuiditas dapat membatasi ekspansi kredit, meningkatkan biaya pendanaan, dan menurunkan profitabilitas bank. Dalam konteks sektor UMKM, variabel makro ini menjadi lebih kritis karena sebagian besar UMKM bersifat sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi makro, baik melalui permintaan pasar, harga bahan baku, maupun akses ke pembiayaan; bank yang menyalurkan kredit kepada UMKM harus mempertimbangkan faktor-faktor makro seperti inflasi, PDB, nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas sebagai bagian dari evaluasi risiko kredit, sehingga pemberian kredit tetap aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor ekonomi makro/moneter tidak hanya penting bagi regulator dan bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter, tetapi juga bagi manajemen bank dan peneliti untuk merancang strategi kredit, menilai risiko portofolio, dan memprediksi perkembangan kredit UMKM di masa depan, sehingga integrasi analisis makroekonomi menjadi bagian penting dalam penelitian dan

pengambilan keputusan perbankan, terutama bagi bank daerah yang menyalurkan kredit kepada sektor UMKM yang memiliki risiko tinggi, ketahanan finansial terbatas, dan sensitivitas yang besar terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga setiap perubahan dalam indikator makroekonomi harus dianalisis secara sistematis untuk menyesuaikan kebijakan kredit, menjaga kesehatan bank, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

#### **2.2.5 Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

- rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Indonesia, peran UMKM selama ini lebih dilihat sebagai sumber kesempatan kerja dan motor penggerak utama perekonomian pedesaan, di luar sektor pertanian. Tahun 2020 menjadi tahun terberat dalam dunia wirausaha akibat pandemi Covid-19 yang sudah ada sejak akhir tahun 2019 yang memaksa setiap usaha untuk memutar haluan strategi. Tidak sedikit juga yang mengalami krisis di saat pandemi,

sehingga beberapa perusahaan sudah merumahkan karyawannya untuk mengurangi beban pembiayaan. Sektor bisnis yang paling banyak terkena imbas adalah sektor penerbangan komersial, travel, minyak dan gas bumi, otomotif dan perbankan. Namun bisnis sektor UMKM juga terkena dampak karena masalah ketersediaan bahan baku dan juga peraturan pembatasan sosial.

Dalam kaitan dengan kemampuan pendanaan, sebagian besar pembiayaan UMKM berasal dari pihak internal, yaitu dana dari pemilik usaha. Sementara pendanaan dari eksternal lebih banyak diperoleh melalui kredit perbankan. Dengan kondisi tersebut UMKM terkesan sangat lemah karena ketergantungan pembiayaan eksternal kepada bank relatif tinggi, sementara mereka tidak memiliki akses yang luas untuk mencari pendanaan lain seperti melalui pasar modal. Akibatnya bila terjadi shock kepada perbankan maka dampaknya terhadap UMKM akan langsung terasa karena umumnya bank menjadi lebih “pilih-pilih” untuk menyalurkan kreditnya. Bahkan dengan alasan kesalahan penilaian dan moral hazard, ketersediaan kredit bagi UMKM akan semakin berkurang.

Keterbatasan informasi terhadap kinerja UMKM biasanya menjadi pertimbangan bagi bank untuk menyediakan kredit kepada UMKM. Untuk menyiasati hal tersebut, “*relationship lending*” yaitu cara memperoleh informasi secara informal melalui pembinaan hubungan dengan pihak pengelola UMKM maupun dengan lingkungan sekitarnya menjadi salah satu jalan yang paling efektif.

Peran perbankan pada UMKM yang mengakses kredit relatif besar akan tetapi proporsi UMKM yang mengakses kredit masih kecil. Berdasar data dari Bank

Indonesia, profil bisnis UMKM dilaporkan bahwa dari seluruh UMKM yang memperoleh pembiayaan, sekitar 76,1% memperoleh kredit dari bank dan 23,9% dari sumber non-bank (misalnya koperasi, LKM), dari data ini menggambarkan bahwa ketika UMKM memperoleh pembiayaan formal, perbankan sering menjadi sumber utama pembiayaan bisnis UMKM. Namun dari hasil data tersebut juga menegaskan bahwa hanya sebagian kecil UMKM yang mengakses pembiayaan formal dan masih banyak UMKM yang belum memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, apabila terjadi *shock* terhadap perbankan yang merupakan sumber utama pendanaan UMKM, maka dapat dimaklumi operasionalisasi UMKM akan sangat terganggu. Disisi lain, dengan segala keterbatasan informasi mengenai kondisi UMKM yang dibiayai, tentu bank akan mengalami kesulitan untuk memonitor kondisi usaha UMKM. Menyikapi hal tersebut, perlu cara tersendiri untuk membina hubungan dengan UMKM sehingga informasi yang terkait dengan mereka dapat terpantau.

Umumnya hubungan pembiayaan antara bank dengan UMKM dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu dengan mempelajari sisi *financial statement*, *asset*, *credit scoring*, dan *relationship lending*. 3 cara pertama merupakan cara yang umum dilakukan oleh bank dalam pemberian kredit termasuk kepada usaha skala besar. Cara tersebut memerlukan “hard information” dan mengedepankan aspek informasi keuangan dari UMKM, seperti laporan keuangan, ketersediaan kolateral, ataupun penilaian aspek keuangan lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit.

Sementara *relationship lending* lebih merupakan pencarian informasi secara informal (*soft information*) yang dilakukan melalui pembinaan hubungan dengan pemilik UMKM maupun lingkungan sekitarnya.

Pada *relationship lending*, keputusan untuk mempertimbangkan pemberian kredit kepada UMKM didasarkan pada informasi yang diperoleh secara informal dari pemilik usaha dan masyarakat sekitar lokasi UMKM tersebut. Informasi yang diperoleh umumnya tidak hanya berupa informasi keuangan seperti laporan keuangan, kolateral ataupun credit score, namun mungkin juga berupa informasi lainnya yang dapat memberikan gambaran potensi usaha UMKM tersebut. Umumnya pula UMKM cenderung mempertahankan hubungan seperti ini dengan banknya.

Bank besar, cenderung menghindari *relationship lending* seperti ini sehingga lebih mengutamakan *hard information*. Dapat dimaklumi apabila bank- bank besar lebih memilih memberikan kredit/pembiayaan kepada perusahaan besar yang memiliki informasi dan data keuangan yang jelas ketimbang UMKM yang data keuangannya kadang kurang memenuhi persyaratan formal yang diminta oleh bank. Penyaluran kredit kepada UMKM diukur dengan rumus:

$$Kredit\ UMKM = \frac{Kredit\ kepada\ UMKM}{Total\ Kredit\ Yang\ Disalurkan} \times 100\% \dots \dots \dots (8)$$

### 2.3 Hubungan Antar Variabel

Penyaluran kredit kepada UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga oleh kondisi makroekonomi yang ada. Dalam konteks ini, rasio-rasio keuangan bank menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan bank dalam

menyalurkan kredit. Setiap rasio keuangan yang dimiliki bank memiliki dampak langsung terhadap kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel utama terhadap penyaluran kredit UMKM:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Hartini, Yuliati, dan Amrul (2023) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Ruslang (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kecukupan modal bank maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Secara teoritis, CAR mencerminkan kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko yang timbul dari kegiatan operasionalnya, termasuk risiko kredit. Bank dengan tingkat CAR yang tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Dengan demikian pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit adalah positif.

2. Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Sari dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah maka bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Secara teoritis, NPL menggambarkan

kualitas aset bank dan tingkat risiko kredit yang dihadapi. Peningkatan NPL mencerminkan meningkatnya risiko gagal bayar sehingga bank cenderung memperketat penyaluran kredit. Semakin tinggi NPL maka penyaluran kredit UMKM cenderung menurun. Dengan demikian pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit UMKM adalah negatif.

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Hartini, Yuliati, dan Amrul (2023) menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya, maka semakin rendah tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Secara teoritis, rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank. Bank yang memiliki rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan relatif besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi kredit karena sebagian besar sumber daya digunakan untuk menutup biaya operasional. Semakin tinggi BOPO, maka penyaluran kredit UMKM cenderung menurun. Dengan demikian pengaruh BOPO terhadap penyaluran kredit UMKM adalah negatif.

#### 4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Ruslang (2024) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Secara teoritis, dana pihak ketiga merupakan sumber dana utama bagi bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai bagian dari fungsi intermediasi perbankan. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Dengan demikian pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit UMKM adalah positif.

#### 5. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Ruslang (2024) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan ekspansi kredit. Secara teoritis, ROA merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Bank dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga memiliki kapasitas yang lebih besar dalam meningkatkan penyaluran kredit. Semakin tinggi

ROA, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Dengan demikian pengaruh ROA terhadap penyaluran kredit UMKM adalah positif.

#### 6. Pengaruh Inflasi terhadap Penyaluran Kredit UMKM

Penelitian Puspitasari dan Musaroh (2022) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM karena perubahan tingkat harga dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat. Secara teoritis, inflasi merupakan indikator kondisi makroekonomi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingginya inflasi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan kemampuan debitur dalam membayar kredit, sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka penyaluran kredit UMKM cenderung menurun. Dengan demikian pengaruh Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM adalah negatif.

### 2. 4 Kerangka pemikiran

Besarnya jumlah kredit oleh perbankan tidak terlepas dari kondisi internal perbankan itu sendiri, khususnya kondisi rasio keuangan (karakteristik perbankan). Selain faktor rasio keuangan, faktor yang juga turut mempengaruhi kredit perbankan adalah faktor makro ekonomi. Seperti disebutkan dalam kajian penelitian terdahulu pada bab 2, Jenkins H dan Hossain M (2017) menemukan bahwa faktor makro

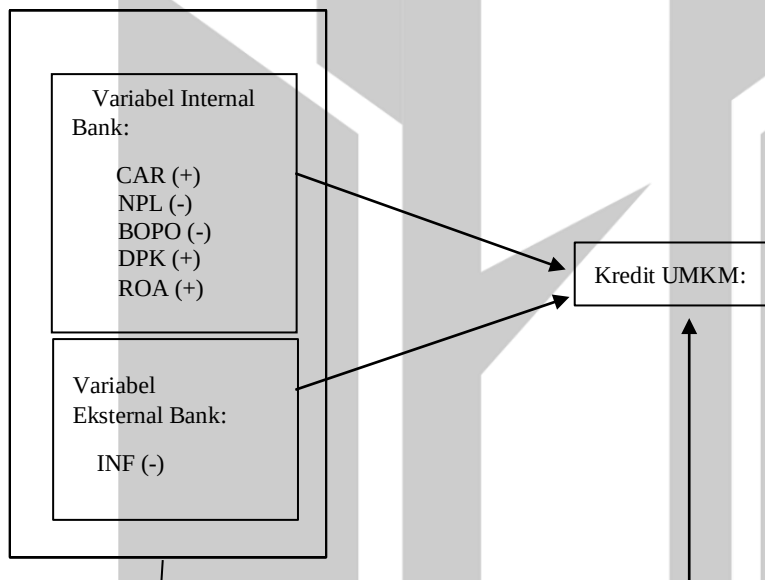
ekonomi, dalam hal ini inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan, hal yang sama juga terjadi pada variabel karakteristik perbankan lainnya yaitu *bank's deposit to capital ratio*, *loan to capital to capital ratio*, *natural log of bank's own assets*, *profit bank ratio* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan.

Selain faktor di atas, dinyatakan oleh Ririh Dian Pratiwi dan Agung (2020) bahwa faktor modal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Faktor makro ekonomi lain yaitu inflasi dan nilai tukar juga turut berpengaruh terhadap kredit perbankan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah CAR dan DPK tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran kredit. Sedangkan variabel ROA, BI Rate dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia tahun 2015-2018.

Dalam studi lain yang dilakukan Risal Rinofah (2015) melakukan penelitian pengaruh variable ekonomi makro terhadap penyaluran Kredit Umum dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekonomi makro terhadap dan UKM di Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah: Inflasi, PDB, BI rate dan Kurs sebagai variabel independen sedangkan variabel dependennya adalah Penyaluran Kredit Umum dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada signifikan secara simultan antara variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan kredit

umum dan pertumbuhan kredit umum dan UMKM di Yogyakarta. Hanya Inflasi yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit di Yogyakarta.

Dengan mendasarkan pada hasil penelitian tersebut, asumsi yang sama penulis berlakukan terhadap pemberian kredit perbankan khususnya kredit UMKM. Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat dibangun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*", maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

2. *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
5. *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
6. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.